

## Elemen-Elemen Demokrasi dalam Pemikiran Jurgen Habermas

Datu Hendrawan<sup>1</sup>, Anastasia Jessica Adinda S.<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, Indonesia  
E-mail: datu@ukwms.ac.id, anastasiajessica@ukwms.ac.id<sup>2</sup>

	<i>This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i> <i>Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Submission: 23-01-2025	Accepted: 13-06-2025	Publish: 15-06-2025

### Abstrak

Penurunan indeks demokrasi di Indonesia dan gejala melemahnya demokrasi di seluruh belahan dunia merupakan hal yang urgen untuk ditanggapi. Indonesia pada tahun 2024 dikategorikan sebagai negara yang masuk dalam kategori *flawed* (cacat) dalam demokrasi berdasarkan pada survey dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Berdasarkan *Lexical Index of Electoral Democracy* (LIED), dari 199 negara, hanya 40% yang memiliki sistem demokrasi dengan hak pilih serta kebebasan berkumpul dan berpendapat yang terjamin. Situasi ini perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Diperlukan pemahaman mengenai demokrasi dan elemen-elemen mendasarinya untuk menganalisis persoalan tersebut. Pendekatan filosofis diperlukan untuk merumuskan elemen-elemen mendasar dalam demokrasi. Elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan memeriksa persoalan krisis demokrasi. Salah satu filsuf yang memiliki pemikiran yang cukup komprehensif mengenai demokrasi adalah Jurgen Habermas. Dalam penelitian ini peneliti hendak memeriksa elemen-elemen mendasar dalam demokrasi menurut pemikiran Habermas serta menemukan relevansinya dalam menghadapi krisis demokrasi dewasa ini. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang berpusat pada interpretasi dan analisis teks. Pemikiran Jurgen Habermas dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai elemen-elemen yang mendasar dalam demokrasi. Elemen-elemen tersebut adalah keberadaan ruang publik, civil society, tindakan komunikatif, pertautan sinergis antara sistem dan dunia kehidupan, diskursus publik, serta proses pengambilan keputusan melalui deliberasi yang rasional. Kelengkapan elemen-elemen tersebut akan semakin memperkuat bangunan demokrasi. Rekonstruksi demokrasi dapat dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan dan keutuhan kondisi dari elemen-elemen tersebut untuk diperbaiki.

**Kata Kunci:** demokrasi; ruang publik; tindakan komunikatif; diskursus; deliberasi

### Abstract

The decline in the democracy index in Indonesia and the symptoms of weakening democracy throughout the world are urgent matters to respond to. In 2024, Indonesia is categorized as a country that is included in the category of flawed democracy based on a survey by The Economist Intelligence Unit (EIU). Based on the Lexical Index of Electoral Democracy (LIED), out of 199 countries, only 40% have a democratic system with guaranteed voting rights and freedom of assembly and opinion. This situation needs to be analyzed. An understanding of democracy and its underlying elements is required to analyze the issue. A philosophical approach is needed to formulate the basic elements of democracy. These elements can be used to analyze and examine the problem of the crisis of democracy. A philosopher who has quite comprehensive thoughts on democracy is Jurgen Habermas. In this study, the researcher intends to examine the basic elements of democracy according to Habermas's ideas and find their relevance in dealing with the current crisis of democracy. This study uses a literature study method, which focuses on interpretation and analysis of texts. Jurgen Habermas's thinking can provide a comprehensive picture of the fundamental elements of democracy. These elements are the existence of public sphere, civil society, communicative action, synergistic links between the system and the life world, public discourse, and the decision-making process through rational deliberation. The completeness of these elements will further strengthen the building of

democracy. Reconstruction of democracy can be done by re-examining the completeness and integrity of the conditions of these elements to be improved.

**Keywords:** democracy; public sphere; communicative action; discourse; deliberation

## 1. Pendahuluan

Demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Aspirasi rakyat seharusnya menjadi penentu bagi jalannya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis, diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan bergerak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut adalah kondisi ideal dalam negara demokratis. Akan tetapi terdapat data yang menunjukkan bahwa terdapat negara yang menganut sistem demokratis yang justru gagal untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Berdasarkan data dari Indeks Demokrasi Elektoral Lexical (LIED), dari 199 negara terdapat 85 persen yang memiliki sistem pemerintahan elektoral (demokrasi), tetapi hanya 40 persen yang menjalankan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dalam data tersebut, Indonesia masuk dalam kategori pemerintahan elektoral yang masih memiliki kelemahan dalam hal kebebasan berpendapat dan berkumpul (Javier, 2025). Suatu negara bersistem demokrasi dapat menunjukkan gejala-gejala yang non-demokratis, seperti terjadinya pemusatan kekuasaan pada golongan/kelompok tertentu, pembungkaman terhadap aspirasi publik dan pers, kekerasan aparat negara, pelemahan lembaga-lembaga pengawas dan penyeimbang bagi kekuasaan, tingginya tingkat korupsi (termasuk di dalamnya kolusi dan nepotisme), melemahnya pluralisme, dan pelemahan ruang publik. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Freedom House tahun 2024 dan laporan "Democracy Index 2023: Age of Conflict" yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia adalah negara yang mengalami penurunan indeks demokrasi. Berdasarkan Freedom House Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi dari 63,23 poin di tahun 2019 menjadi 54,84 pada tahun 2023. Sementara berdasarkan EIU, pada 2024 Indonesia mengalami penurunan dua tingkat ke peringkat 56 dengan skor 6,53, dibandingkan tahun 2022 (skor 6,71). EIU menggunakan lima dimensi dalam mengukur indeks demokrasi, yaitu proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikategorikan sebagai 'cacat demokrasi' (flawed democracy) (Nababan, 2024; Muamar, 2024).

Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat adalah unsur yang penting dalam demokrasi. Di Indonesia, intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan, aktivis dan orang yang bersuara kritis masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menerima 33 laporan kekerasan terhadap jurnalis dalam periode Januari – Juli 2024. Pada tahun sebelumnya, tahun 2023 AJI mencatat terdapat 89 kasus kekerasan (Hanafi, 2024). Koalisi Masyarakat Sipil pada bulan Mei 2025 menyuarakan terjadinya insiden teror dalam bentuk pengintaian, intimidasi, hingga serangan fisik dan digital terhadap akademisi, aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan warga sipil yang menyampaikan pandangan kritis terkait dengan keterlibatan TNI pada urusan sipil. Salah satu aksi teror yang terjadi adalah pengiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus pada redaksi Tempo (Abdurrahman, 2025).

Gejala krisis demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa peristiwa, seperti junta militer di Myanmar, pemilihan umum di Amerika yang mengedepankan populisme ultra kanan, penolakan terhadap pengungsi di Eropa yang diikuti menguatnya politik identitas, dan pengumuman wajib militer yang berujung pada upaya *impeachment* di Korea Selatan merupakan gejala-gejala krisis demokrasi yang terjadi di seluruh dunia. Di banyak negara dengan sistem demokratis terjadi konflik internal yang semakin tajam.

Persoalan mengenai sistem demokrasi sebenarnya sudah dibahas semenjak masa Yunani Kuno. Plato berpendapat bahwa pemerintahan demokrasi (Yunani) memiliki kelemahan yang besar. Rakyat (*demos*) dalam dialog Plato, dianggap sangat berpotensi untuk bertindak secara egois dan saling berperang satu sama lain. Akibatnya pemerintahan yang bersandar pada kehendak rakyat sebagai pusatnya, justru berpotensi menjadi masyarakat yang kacau balau. Masyarakat yang cenderung mengejar hasrat-hasrat yang egoistis dan kecintaan akan kekayaan membuat demokrasi berujung pada kekacauan (Plato, 2000). Kondisi masyarakat rentan menjadi *chaos*, apabila sistem demokrasi tidak disertai dengan warga negara yang berkeutamaan.

Kesangsian akan bentuk pemerintahan demokratis tersebut dilanjutkan lagi oleh Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi (Yunani) adalah bentuk pemerintahan yang buruk, terutama demokrasi yang tanpa undang-undang. Dalam demokrasi macam ini kekuasaan terancam akan dipegang oleh para demagog (Bertens, 2006). Persoalan-persoalan demokrasi sebagaimana digambarkan oleh Plato dan Aristoteles tersebutnya, nampaknya masih relevan dalam praktik demokrasi saat ini.

Sentimen-sentimen antarkelompok masyarakat yang muncul karena perbedaan identitas, pilihan, ideologi berpotensi membuahkan konflik-konflik yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu bentuk konflik yang menonjol pada masa ini adalah konflik yang muncul karena keberagaman (suku, agama, ras, pilihan ideologis). Di Indonesia tidak setiap segregasi identitas berujung menjadi konflik, tetapi terdapat beberapa segregasi kelompok yang berujung pada konflik berkepanjangan (Apud, 2019). Pendekatan taktis untuk meredakan konflik dengan memanfaatkan kekuatan fisik, sering kali tidak menyentuh akar masalah yang ada.

Demokrasi pada dasarnya dibangun berlandaskan pada keberadaan masyarakat yang menyadari bahwa mereka hidup bersama dengan yang lain, dan mau untuk membangun organisasi hidup bersama dengan 'yang lain'. Dalam masyarakat demokratis, masyarakat harus siap untuk hidup bersama dengan warga/komunitas yang memiliki banyak perbedaan satu sama lain, baik dalam konteks pandangan pribadi, suku, agama, ras, dan budaya. Pada negara yang memiliki wilayah yang luas dan terpisah-pisah oleh lautan dan memiliki masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, kesadaran hidup sebagai komunitas (dalam negara) menjadi sangat penting. Peristiwa-peristiwa konflik identitas menunjukkan bahwa kelekatan dan kesadaran untuk hidup sebagai bagian dari negara (Indonesia) sering kali dikalahkan oleh sentimen-sentimen kesukuan, agama, kelas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, status, dan sebagainya.

Sistem demokrasi di Indonesia yang cenderung mengembangkan semangat komunitarian terlihat dalam kecenderungan masyarakat untuk mengidentifikasi sebagai etnos, sebagai warga komunitas (wilayah, etnis atau agama) daripada sebagai warga Indonesia (*citizen*) (Menoh, 2015). Dalam sistem demokrasi, di mana konflik kepentingan, dan sentimen-sentimen antar golongan dapat berkembang, bangunan argumen dalam sistem demokrasi justru sering kali diarahkan untuk sekadar menjadi alat perlawanan terhadap orang/kelompok/komunitas yang menjadi lawan.

Berhadapan dengan situasi konfliktual dalam demokrasi, beberapa kelompok masyarakat sering kali tergoda untuk berada dalam tatanan yang stabil dan damai yang justru merujuk pada pemerintahan yang otoriter di masa lampau. Kata-kata 'isih enak zamanku to' yang diberi gambar Soeharto (presiden di era Orde Baru), menjadi populer. Istilah tersebut menandakan kerinduan untuk hidup dalam situasi politik yang terlihat damai di masa lampau, tetapi mengabaikan tantangan-tantangan hidup bernegara yang terjadi pada masa itu, khususnya terkait dengan demokrasi. Pembredelan media yang kritis, serta kekerasan terhadap mahasiswa dan aktivis yang terjadi pada masa itu adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk merefleksikan kembali mengenai demokrasi dalam gagasan Jurgen Habermas. Pemikiran Habermas dapat memberikan landasan filosofis bagi demokrasi sekaligus memberikan dorongan praksis yang relevan bagi demokrasi. Dalam karya-karyanya, Habermas menguraikan elemen-elemen yang mendasar dalam demokrasi. Pemikiran Habermas mengenai politik dan demokrasi berpusat pada prosedur komunikasi.

Pemikiran Habermas bertujuan untuk merekonstruksi demokrasi. Persoalan-persoalan dalam demokrasi bukan terjadi karena demokrasi itu buruk. Persoalan-persoalan yang terjadi di negara-negara demokrasi justru muncul karena absennya elemen-elemen dasar dari demokrasi itu sendiri. Berhadapan dengan situasi ini, maka yang perlu dilakukan bukanlah menghilangkan demokrasi, tetapi merekonstruksi demokrasi. Bangunan demokrasi yang terlihat rusak perlu diperiksa kembali, bagian-bagian mana yang mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki. Untuk bisa mengenali kerusakan dan memperbaiki bangunan demokrasi, diperlukan pengetahuan mengenai elemen-elemen dasar penyusun demokrasi.

Penelitian ini berangkat dari satu rumusan pertanyaan mendasar: Apa elemen-elemen demokrasi dalam pemikiran Habermas? Bagaimana relevansi elemen-elemen tersebut untuk rekonstruksi demokrasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan memahami elemen-elemen mendasar demokrasi dalam gagasan Jurgen Habermas. Melalui pemahaman yang

mendasar dan komprehensif atas aspek-aspek tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan praksis-praksis yang relevan menuju demokrasi yang semakin radikal.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi teks dan analisis teks. Penulis membaca dan melakukan interpretasi atas buku-buku dan karya tulis mengenai pemikiran Habermas yang terkait dengan demokrasi, tindakan komunikatif dan ruang publik politik. Beberapa buku Habermas seperti *Between Fact and Norm* (1996), *Structural Transformation of Public Sphere* (1991) menjadi sumber utama dalam karya ini dengan dibantu oleh buku pendukung seperti buku *Demokrasi Deliberatif, Teori Tindakan Komunikatif dan Ruang Publik* dari Budi Hardiman. Dari pembacaan teks, penulis melakukan interpretasi (hermeneutik) dan analisis untuk mensistematisasi aspek-aspek demokrasi dalam pemikiran Habermas.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Latar Belakang Pemikiran Jürgen Habermas

Jürgen Habermas besar di sebuah kota bernama Gummersbach dekat kota Dusseldorf pada tahun 1929. Dia terlahir dalam sebuah keluarga yang menyesuaikan diri dengan rezim Hitler akan tetapi tidak secara aktif mendukungnya. Sebagai warga Jerman pada waktu itu, Habermas yang berusia 16 tahun bergabung dengan Hitler Youth Movement. Pandangannya secara total berubah ketika dia menonton film dokumenter mengenai Holocaust dan mengikuti Nuremberg trial (Ingram, 2010).

Pada waktu muda Habermas belajar filsafat di Göttingen, Zurich, dan Bonn. Dia bukanlah mahasiswa yang berpikiran radikal pada awalnya. Pada tahun 1954 Habermas menyelesaikan disertasinya tentang Schelling (Finlayson, 2015). Dia kemudian mulai mempelajari karya Herbert Marcuse dan Marx muda, kemudian menjadi asisten bagi Theodor Adorno di Institut Penelitian Sosial Frankfurt. Pemikiran Habermas mengalami perubahan seiring dengan pengalamannya bekerja bersama kedua gurunya di Frankfurt yaitu Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Habermas sempat menjadi pengganti Max Horkheimer untuk menjabat sebagai Direktur Institut Penelitian Sosial pada tahun 1964.

Jürgen Habermas adalah seorang filsuf yang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi dunia kontemporer. Pada tahun 2015, majalah *The Prospect* menempatkan Habermas dalam jajaran 10 pemikir paling berpengaruh di dunia (Petersen, 2015). Apa yang dikerjakan Habermas dalam dunia filsafat membentang mulai dari filsafat kritis, filsafat bahasa dan komunikasi, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat hukum hingga etika. Keaktifan Habermas dalam menulis, membangun teori dan berinteraksi dengan dunia 'nyata' membuat Habermas juga sangat dikenal dengan di kalangan intelektual non filsafat. Habermas merupakan penggagas teori yang juga mempertimbangkan konsekuensi praktis dari pemikirannya.

Pemikiran Habermas sangat dipengaruhi oleh tradisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Teori Kritis adalah paradigma teori yang bertujuan membebaskan masyarakat dari penindasan. Paradigma yang dibangun dalam teori kritis didasari oleh kegelisahan atas situasi-situasi penindasan yang terjadi dalam konteks kehidupan. Teori kritis menempatkan teori yang dibangun Karl Marx mengenai masyarakat kapitalis sebagai model, karena teorinya tidak sekadar mengungkapkan fakta, tetapi membangun kesadaran atas situasi penindasan dan mendorong upaya emansipasi. Paradigma kritis yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt tidak berhenti pada ranah ekonomi saja, tetapi diperluas dalam banyak konteks penindasan masyarakat, seperti terjadinya Holocaust yang terkait dengan politik identitas.

Habermas membawa nuansa yang sangat berbeda dengan pemikir teori kritis yang mendahuluinya. Para pemikir teori kritis tahap pertama cenderung memiliki nuansa yang amat pesimis menghadapi keadaan yang menindas, serta disebut-sebut hanya bekerja dalam ranah teori. Dengan tetap berpijak pada semangat emansipatoris, Habermas menawarkan langkah solutif untuk keluar dari kebuntuan praksis dalam teori kritis melalui praksis komunikasi (Al Munir, 2023).

Pemikiran awal Habermas sebenarnya dapat dikatakan masih berada di jalur yang sama dengan pemikir teori kritis pendahulunya, yaitu pendekatan filsafat kesadaran. Akan tetapi paradigma pemikiran Habermas berubah menuju kearah rasio komunikasi. Perubahan tersebut agaknya dipengaruhi oleh kesadaran bahwa paradigma teori kritis pun berpotensi mengarahkan

orang untuk patuh. Artinya teori kritis juga berpotensi menindas, padahal perlawanan terhadap penindasan adalah inti terdalam dari teori tersebut. Pemikiran Habermas memiliki kekuatan emansipatoris karena mendorong masyarakat untuk menelanjangi realitas sosial, khususnya realitas penindasan dengan mengidentifikasi unsur-unsur ideologis (Shahwirman, 2023). Pemikiran Habermas memiliki tujuan emansipatoris untuk membebaskan pikiran dan tindakan dari sistem-sistem yang membelenggu dan dari cara berpikir yang monologal (Siregar, 2021).

Paradigma komunikasi ini nantinya akan dikembangkan sebagai prosedur moral yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan/norma/hukum yang terkait dengan kepentingan publik. Habermas justru menunjukkan bahwa persoalan-persoalan dalam filsafat sebenarnya terkait dengan konteks keseharian manusia. Habermas berangkat dari fenomena komunikasi, sebagai titik pijak dalam mendalami persoalan-persoalan sosial dan politik. Habermas melalui pemikirannya berusaha menunjukkan bahwa persoalan-persoalan seputar semangat pencerahan seperti kebebasan, rasionalitas dan kesetaraan sebenarnya berada pada (dimulai dari) percakapan sehari-hari (Ingram, 2010).

#### **b. Ruang Publik Politik dan Warga Berdaya**

Paradigma khas Habermas yang secara tidak langsung mulai menyentuh persoalan komunikatif, ada pada gagasan mengenai ruang publik yang nantinya juga akan dikembangkan bersama teori tindakan komunikatif. Konsepsi ruang publik menurut Habermas adalah ruang publik yang berkembang dari model ruang publik borjuis di Eropa pada masa Pencerahan.

Ruang Publik dapat mengacu pada dua arti. Pertama, Ruang Publik sebagai suatu ruang yang dapat diakses semua orang, maka keberadaan Ruang Publik dibatasi oleh keberadaan ruang lain secara spesial, yaitu ruang privat (Hardiman, 2010). Ruang publik mengacu pada kehidupan publik yang terkait dengan kewarganegaraan dan keadaban. Sementara ruang privat mengacu pada aspek intimitas, seperti keluarga dan rumah. Dalam pengertian ini ruang publik dimengerti secara deskriptif. Kepublikan menurut Habermas, adalah sesuatu yang diakses dan ditujukan untuk semua orang. Negara pada dasarnya adalah otoritas publik (Habermas, 1989).

Kedua, Ruang Publik dimengerti secara normatif yang mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi (Hardiman, 2010). Demokrasi sebagai pemerintahan yang dipusatkan pada demos (warga) menuntut partisipasi aktif dari warga negara untuk turut membangun keadaban publik. Dalam arti ini ruang publik dimaknai sebagai aktivitas publik (masyarakat). Ruang publik jenis kedua ini disebut sebagai Ruang Publik Politis. Ruang publik Politis adalah suatu ruang komunikasi para warga negara untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan (Habermas, 1989).

Dalam konteks Habermas, Ruang Publik adalah tempat terjadinya komunikasi antar masyarakat warga, yang dapat mempengaruhi konstelasi politik suatu pemerintahan (Habermas, 1997). Ruang publik merupakan ruang emansipatoris, di mana masyarakat diperlakukan secara egaliter (Prasetya, 2022). Ruang publik membutuhkan partisipasi dari masyarakat sipil yang berdaya. Masyarakat berdaya inilah yang disebut sebagai *civil society* (masyarakat sipil/masyarakat warga).

Masyarakat dalam pandangan Habermas adalah masyarakat yang berdiskursus melalui tindakan komunikatif. Apa yang hendak dilakukan oleh negara juga terkait dengan diskursus masyarakat warga tersebut. Diskursus dapat berlangsung dalam pertemuan-pertemuan, media, komentar-komentar terhadap kebijakan pemerintah dan capaian prestasi dari parlemen. Masyarakat warga mengepung para politisi melalui diskursus, dan karena sifatnya yang kolektif dan terus menerus diwacanakan, mereka tidak dapat begitu saja diabaikan (Suseno dalam Hardiman (ed), 2010). Dewasa ini konteks ruang publik juga dapat diperluas melalui teknologi dan dunia virtual, yang memunculkan ruang publik digital.

Dalam masyarakat demokratis diperlukan ruang publik yang utuh dan otonom dari imperatif-imperatif pasar dan negara (Hardiman 2010). Model ruang publik politik Habermas diambil dari situasi masyarakat pencerahan pada abad ke-18 di mana terdapat para kritikus sastra, politik dan filsafat yang duduk berdiskusi di *café*, *literary salon*, atau pubs yang menjamur di Inggris, Prancis dan Jerman. Diskursus masyarakat warga yang digambarkan Habermas pada masa tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan ciri-ciri kepublikan pada abad sebelumnya. Ruang publik pada masa sebelumnya cenderung merupakan representasi status aristokrasi. Ruang Publik yang disebut Habermas sebagai Ruang Publik borjuis (*bürgerliche Öffentlichkeit*) tersebut merupakan partisipasi warga dalam memperbincangkan persoalan-persoalan publik. Pembicaraan ruang publik borjuis sebagaimana digambarkan Habermas memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kebijakan publik (Habermas, 1989).

Ruang publik borjuis tersebut, memiliki tiga ciri dasar. Ciri pertama, para aktornya bukan merupakan bagian dari birokrasi negara ataupun kalangan bisnis yang dapat berafiliasi dengan kekuasaan. Aktor dari ruang publik borjuis ini adalah masyarakat umum yang berasal dari kelas menengah. Diskursus dan komunikasi yang dilakukan di ruang publik bersifat otonom dari campur tangan kekuasaan. Ruang publik merupakan tempat terjadinya aktivitas komunikasi di antara orang-orang yang setara. Otoritas ditempatkan sebagai salah satu elemen dalam komunikasi (Hardiman, 2010). Ruang publik dihidupkan oleh orang-orang yang tidak berafiliasi dengan kekuasaan, supaya diskursus yang berlangsung bukanlah diskursus yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Diskursus yang berlangsung justru diharapkan dapat memberikan dorongan pada pemerintah/otoritas untuk mengambil langkah dan keputusan yang sesuai dengan kepentingan publik. Keberadaan aktivitas publik dalam ruang publik dimaksudkan sebagai langkah emansipatoris.

Kedua, terjadi pemberdayaan antar para aktor tersebut melalui pemaksimalan '*public use of reason*'. Ruang publik dalam bayangan Habermas, adalah ruang publik yang syarat dengan aktivitas komunikasi yang rasional. Rasionalitas menjadi unsur utama yang menjiwai komunikasi. Dalam Ruang Publik pertimbangan-pertimbangan rasional dinyatakan tanpa dibebani rasa takut dengan dilandasi persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan publik. Ruang publik menjadi tempat bernaung bagi warga yang memiliki kegelisahan dan menghendaki perubahan (Hardiman, 2010). Situasi ideal dalam ruang publik politis adalah kebebasan berpendapat yang didasari oleh argumen-argumen rasional. Tantangan yang terdapat pada ruang publik, adalah penggunaan rasionalitas penguasaan. Habermas memaksudkan rasionalitas sebagai rasionalitas yang reflektif dan evaluatif.

Ketiga, Ruang Publik menjadi mediasi antara isu-isu privat antar individu di dalam keluarga, bisnis dan sosial. Melalui ruang publik, dikotomi antara bourgeois (anggota kelas ekonomi) dan citizen (anggota komunitas politis diatasi lewat pencarian kepentingan publik (Hardiman, 2010). Istilah '*Bourgeois*' menandakan kelas ekonomi yang bersifat individual, sedangkan '*citoyen*' menandakan manusia sebagai bagian dari warga negara. Di ruang publik isu-isu terkait dengan persoalan individual dapat dipersoalkan dengan menempatkannya dalam konteks sosial. Agar dapat dibicarakan secara publik, tentu isu tersebut perlu ditempatkan dalam wacana kesosialannya. Ketika ada orang yang mengalami kelaparan dan hidupnya berkekurangan (sebagai individu), maka di ruang publik situasi tersebut dapat dikomunikasikan sebagai isu kemiskinan, yang bersifat publik.

Bagi Habermas, Ruang Publik adalah tempat dimungkinkannya praksis pembebasan. Habermas menyadari bahwa pada masyarakat kapitalisme lanjut telah terjadi perubahan struktural dalam ruang publik dan mengajukan kritik atas situasi tersebut. Kritik ditujukan pada negara intervensionis yang dengan sengaja melakukan intervensi kekuasaan di ruang publik dan praktik monopoli bisnis oleh korporasi besar yang turut mengintervensi ruang publik. Kepentingan-kepentingan privat korporasi besar memiliki fungsi politis untuk mengendalikan media dan birokrasi negara sehingga kebijakan-kebijakan negara justru hadir untuk mendukung kepentingan bisnis tersebut (suprastruktur). Birokrasi mulai campur tangan dalam wilayah-wilayah privat sehingga mengaburkan antara privat dan publik (Hardiman, 2010). Kepentingan-kepentingan privat mulai merambah ruang publik dan kepublikan justru kehilangan maknanya. Akses terhadap publik justru menjadi eksklusif.

Pada awal pemikirannya, Habermas memaksudkan ruang publik sebagai sarana bagi gerak emansipatoris. Dalam perkembangan pemikirannya, Habermas menempatkan Ruang Publik Politis sebagai salah satu elemen mendasar bagi negara hukum demokratis. Sistem demokrasi yang berpusat pada aspirasi masyarakat, tentu harus memiliki 'ruang' bagi masyarakat sipil untuk menyalurkan aspirasi. Sebagai bagian dari suatu kepublikan, maka manusia juga dimungkinkan untuk mengembangkan sikap dan melakukan tindakan yang memiliki intensi publik. Melalui kesadaran, kepedulian terhadap 'yang publik' inilah demokrasi dapat terbangun.

### **c. Tindakan Komunikatif dan Keterhubungan Dunia Kehidupan-Sistem**

Habermas menyadari bahwa yang mendasar dalam ruang publik adalah terjadinya praksis komunikasi. Berdasarkan kesadaran tersebut, Habermas kemudian mengembangkan gagasan mengenai tindakan komunikatif.

Tindakan komunikatif, pada awalnya dimaksudkan oleh Habermas, sebagai suatu pusat dari bangunan filsafat. Habermas ingin membangun sebuah sistem filsafat kritis yang berpusat pada tindakan komunikatif. Manusia dan kesadarannya dibentuk dalam dinamika komunikasi.

Manusia memiliki kesadaran akan realitas dan dunia juga melalui komunikasi. Teori tindakan komunikasi memberikan gambaran bahwa praksis komunikasi merupakan sesuatu yang sentral baik dalam membentuk pengetahuan dan gambaran tentang dunia ataupun dalam menentukan sikap dan tujuan bagi manusia serta sekaligus menjadi pusat bagi gerak masyarakat yang dinamis (Habermas, 1984).

Jalan yang ditempuh Habermas tersebut berupaya untuk mengatasi problem-problem filsafat sebelumnya yang memiliki paradigma filsafat kesadaran. Filsafat selalu berusaha menjelaskan segala sesuatu dengan berdasarkan pada kesadaran diri. Jalan tersebut adalah monolog dan berusaha mengarahkan manusia yang lain seturut dengan kesadarannya. Paradigma komunikasi yang ditawarkan Habermas tidak lagi melihat subjek sebagai subjek terisolir yang mengenali dan memanipulasi objek-objek di hadapannya secara monologal, melainkan memahami subjektivitas dan pengetahuan sebagai hasil dari proses komunikasi intersubjektif (Hardiman, 2010). Rasionalitas dalam filsafat kesadaran merupakan buah dari pengalaman dan kesadaran individu. Bagi Habermas rasionalitas bersifat komunikatif.

Tindakan komunikatif kemudian dikembangkan menjadi gagasan sentral dalam pembahasan mengenai etika dan politik. Dalam gagasan mengenai etika diskursus dan negara hukum demokratis, Habermas kemudian mengarahkan perhatiannya kepada kondisi-kondisi komunikasi sebagai jalan praksis untuk dapat mencapai konsensus secara bebas dan fair.

Praksis dilandasi kesadaran rasional, maka rasionalitas tidak hanya ditunjukkan dalam kegiatan menaklukkan alam melalui kerja (Marx), akan tetapi rasionalitas juga tampak dalam interaksi intersubjektif yang menggunakan bahasa sehari-hari (Hardiman 2009). Habermas membuat distingsi dalam tindakan dasar manusia. Dalam tindakan rasional manusia pada dasarnya melakukan tindakan non-sosial dan sosial. Tindakan dalam berhadapan dengan dunia alamiah, khususnya non-manusia, pada dasarnya merupakan tindakan rasional-bertujuan. Sementara pada tindakan sosial terdapat dua kecenderungan. Seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan untuk instrumental. Tindakan ini disebut sebagai tindakan strategis. Akan tetapi dalam interaksi terdapat hal yang lebih mendasar (*genuine*) daripada tindakan strategis, yaitu tindakan komunikatif (Hardiman, 2017).

Penyelesaian problem sosial, diyakini oleh Habermas dapat dilakukan dengan tindakan komunikatif. Melalui tindakan komunikatif diharapkan para pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan masalahnya. Dalam berkomunikasi gangguan akibat bahasa dan perbedaan pemahaman serta ideologi dapat mengganggu jalannya tindakan komunikatif. Untuk menghindari distorsi-distorsi komunikasi, Habermas membangun diskursus etika, yaitu suatu justifikasi normatif untuk mencapai kesesuaian kepentingan antar anggota (*generalizable interest*) (Bertens, 2006).

Habermas membedakan dua macam tindakan dalam komunikasi. Pertama, tindakan komunikatif sebagai mekanisme untuk mencapai konsensus melalui persetujuan secara intersubjektif. Konsensus terbentuk melalui pengetahuan bersama yang juga diterima secara intersubjektif. Kedua, tindakan strategis, yakni tindakan yang berorientasi pada keberhasilan. Berusaha mempengaruhi seseorang untuk mengikuti kemauannya adalah salah satu bentuk tindakan strategis. Dalam tindakan strategis bahasa tidak memiliki orientasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman melainkan digunakan sebagai sarana untuk menguasai atau memaksakan kehendak. Bagi Habermas tindakan komunikatif sebagai tindakan yang mengarah pada konsensus rasional lebih fundamental dalam menghasilkan mekanisme koordinasi sosial (Hardiman, 2009).

Tindakan komunikatif perlu digerakan oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatif dapat digambarkan sebagai cara berpikir yang mengedepankan tujuan-tujuan komunikasi tanpa syarat. Dalam rasio komunikatif, para pelaku mengikat persetujuan dan konsensus berdasarkan klaim-klaim validitas yang diterima secara intersubjektif dan senantiasa terbuka terhadap kritik (Habermas, 1996).

Apabila bahasa digunakan sebagai sarana untuk saling memahami, maka pelaku tindakan komunikatif diandaikan mengeluarkan klaim-klaim validitas (*Geltungsanspruch*), yaitu pernyataan yang benar secara epistemologis (*wahr*), tepat/benar secara normatif (*richtig*), atau jujur (*wahrhaftig*). Klaim mengenai kebenaran (*wahr*) terkait dengan kesesuaian suatu pernyataan dengan dunia objektif (alam) seperti pada pernyataan mengenai situasi alam: bunga mawar di kebun berwarna merah. Klaim ketepatan/kebenaran normatif tindakan adalah terkait dengan pernyataan yang terkait dengan dunia sosial intersubjektif (masyarakat) Klaim mengenai kejujuran adalah pernyataan mengenai dunia subjektif (individual), misal: pernyataan tentang perasaan-perasaan individual (Habermas, 2007).

Melalui diskursus etika, tindakan komunikatif dengan argumen-argumen terbaiknya dapat dimengerti dengan “keyakinan-keyakinan rasional”. Demi mencapai “keyakinan-keyakinan rasional” tersebut, Habermas kemudian merumuskan syarat-syarat komunikatif sebagaimana yang terangkum dalam *the ideal speech situation* (situasi percakapan yang ideal) (Habermas, 2007) sebagai berikut.

- 1) Semua peserta (subjek) yang kompeten untuk berbicara dan bertindak (dalam diskusi rasional) boleh untuk ambil bagian dalam diskursus,
- 2) Setiap peserta mempunyai peluang yang sama untuk mengajukan pertanyaan mengenai suatu pendapat, setiap peserta juga diperkenankan untuk mengajukan pendapat di dalam diskursus, setiap orang juga diperbolehkan untuk mengekspresikan sikap, keinginan dan kebutuhannya.
- 3) Pembicara tidak boleh dihalangi oleh paksaan-paksaan baik paksaan internal maupun paksaan eksternal untuk mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam nomor 1 dan nomor 2.

Akan tetapi tindakan komunikatif ini memiliki kelemahan apabila dihadapkan pada dunia sosial yang dikuasai oleh rasionalitas sistem yang bersifat instrumental. Rasionalitas (sebagian besar rasionalitas formal) yang telah mencirikan sistem-sistem sosial berbeda dari, dan berkonflik dengan, rasionalitas yang mencirikan dunia kehidupan. Rasionalitas sistem merujuk pada pembuatan sistem-sistem baru yang berciri instrumental pada masyarakat industri modern. Sistem-sistem sosial yang didominasi oleh rasio sistem menjadi semakin rumit, terdeferensiasi, terintegrasi, dan dicirikan oleh akal instrumental. Menurut Habermas, masyarakat rasional akan menjadi masyarakat tempat sistem maupun dunia kehidupan akan menghasilkan masyarakat dengan kelimpahan material dan berhasil dalam pengendalian lingkungannya sebagai hasil sistem-sistem rasional dan dengan kebenaran, kebaikan, serta menghasilkan keindahan yang berasal dari suatu dunia-kehidupan yang rasional. Akan tetapi, di dunia modern sistem telah mendominasi dan mengolonisasi dunia kehidupan. Buah dari rasionalitas sistem justru menghalangi manusia untuk menerima pengkayaan kehidupan dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) (Ritzer, 2012).

Pengetahuan latar-belakang yang membentuk konteks komunikasi di balik tindakan komunikatif disebut Habermas sebagai *Lebenswelt* (dunia-kehidupan). *Lebenswelt* dapat digambarkan sebagai horizon atau keluasan jarak pandang yang dapat bergeser sesuai posisi pengamat (Habermas, 1987). *Lebenswelt* inilah yang juga memungkinkan terjadinya tindakan komunikatif untuk membantu pencapaian konsensus sebagai basis bagi para pelaku tindakan komunikatif. *Lebenswelt* sekaligus dipelihara, diteruskan dan direproduksi lewat tindakan komunikatif. Komponen-komponen dari *Lebenswelt* adalah pola-pola budaya, tatanan-tatanan legitim dan struktur-struktur kepribadian sebagai pemadatan dan endapan proses-proses pemahaman, koordinasi, tindakan dan sosialisasi yang berlangsung melalui tindakan komunikatif (Hardiman, 2009).

Dunia kehidupan meliputi aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk segala kebutuhan, ekspresi, kegelisahan dan segala persoalan manusia berada. Sistem dibuat untuk menopang dunia kehidupan supaya segala persoalan dalam dunia kehidupan dapat diselesaikan, segala kebutuhan dunia kehidupan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Perbandingan dunia kehidupan dan dunia sistem dapat dicontohkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari (dunia kehidupan) dan dunia kerja di perkantoran (dunia sistem).

Dunia kehidupan hadir sebagai jaringan kerjasama-kerjasama yang dimungkinkan lewat komunikasi dalam jaringan fungsional. Tindakan-tindakan terakhir ini seolah-olah terjadi secara mekanis dan di luar intensi pelaku. Sistem dalam masyarakat modern terlihat pada bidang ekonomi dan kuasa. *Lebenswelt* nampak pada solidaritas masyarakat. Ketiganya merupakan tiga komponen integritas masyarakat. Habermas berbicara tentang hilangnya sambungan antara sistem dan *Lebenswelt*. *Lebenswelt* didesak oleh sistem, karena sistem menjadi semakin rumit (Hardiman, 2009).

Dunia kehidupan semakin menyempit, karena didesak oleh sistem. Persoalan tersebut dapat dibuktikan ketika terdapat jam kerja yang menjadi semakin panjang sehingga waktu bersama keluarga tempat dunia kehidupan berada semakin sempit. Dunia-kehidupan yang berpusat pada solidaritas, saat ini dijajah oleh subsistem subsistem ekonomi (uang) dan politik (kuasa) yang saling berhubungan. Sistem ekonomi telah terinjeksi pada masyarakat sebagai sistem yang mendominasi kehidupan. Semua yang terkait dengan kebahagiaan, kesenangan dan pemenuhan kenikmatan dikaitkan melulu melalui dimensi ekonomi. Media uang dan kuasa bukan saja mewarnai pergaulan manusia dalam “sistem” kemasyarakatan (wajar) melainkan

juga menyelinap ke dunia-kehidupan dan di situ mendesak komunikasi. Komunikasi simetris terhalang secara sistematis (Bertens, 2006).

Menurut Habermas masalah modernitas harus dipecahkan dalam hubungan antara sistem dengan dunia kehidupan. Habermas mengusulkan dua tindakan kongkret: Pertama, "pengendalian batas-batas" harus ditempatkan untuk mengurangi dampak sistem pada dunia-kehidupan. Kedua, "sensor" harus dibangun untuk meningkatkan dampak dunia-kehidupan pada sistem (Ritzer, 2012). Berhadapan dengan situasi kontemporer yang plural, Habermas memiliki gagasan mengenai rasionalisasi dunia kehidupan. Dalam *lebenswelt*, diperlukan kerangka-kerangka argumen yang dapat mendasari hidup bersama di tengah pluralitas nilai (Habermas, 1996).

Habermas menyimpulkan bahwa masalah-masalah kontemporer tidak dapat dipecahkan "dengan sistem-sistem yang belajar berfungsi dengan lebih baik. Persoalan kontemporer dapat diselesaikan justru melalui dorongan-dorongan hati yang kuat dari dunia-kehidupan yang harus mampu masuk ke dalam sistem-sistem fungsional yang mengemudikan diri sendiri. Kemitraan penuh di antara rasionalitas sistem dan dunia-kehidupan akan merupakan penyempurnaan proyek modernitas (Ritzer, 2012).

Daya kritis menurut Habermas merupakan sesuatu yang penting dalam proyek tersebut. Tujuan ilmu-ilmu kritis adalah untuk kepentingan emansipatoris membantu masyarakat untuk mencapai otonomi dan kedewasaan. Masyarakat kritis direpresentasikan sebagai masyarakat komunikatif. Kritik dilakukan bukan dengan jalan revolusi atau kekerasan, melainkan melalui komunikasi argumentatif (Hardiman, 2017). Di sini, Habermas memiliki disposisi pemikiran pada para tokoh sebelumnya yang memiliki kecenderungan revolusioner. Habermas meyakini bahwa emansipasi justru dapat semakin bebas dari kontradiksi apabila dijalankan melalui praktik tindakan komunikatif.

#### **d. Diskursus dalam Demokrasi Deliberatif**

Dalam masyarakat post-tradisional, di mana masyarakat mulai menyadari melalui perjumpaannya keadaan dunia yang plural, diskursus etis-politis akan menjadi semakin tidak terhindarkan. Perluasan kesadaran akan membuat masyarakat sadar bahwa identitas-identitas kolektif adalah sesuatu yang rapuh, berubah-ubah dan kabur. Hal ini akan semakin mendorong terjadinya proses diskursus etis (Habermas, 1996). Masyarakat kontemporer adalah masyarakat yang sangat kompleks. Perjumpaan-perjumpaan antar sistem dalam masyarakat adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Apabila pada masa sebelumnya masyarakat berciri lokal, pada masa modern konteks kelokalan ini disadari akan menjadi tidak relevan lagi berhadapan dengan perjumpaan-perjumpaan sebagai akibat dimensi ruang dan waktu semakin bisa diatasi oleh teknologi. Situasi tersebut membuat manusia mengalami perjumpaan dengan berbagai bentuk situasi sosial, terjadi perjumpaan antar nilai sebagai akibat dari perjumpaan antar masyarakat. Dalam situasi tersebut maka akan muncul suatu persoalan bagi manusia, terkait dengan legitimasi atas kebenaran beserta nilai-nilai yang sering kali saling berbenturan satu sama lain.

Pernyataan-pernyataan dapat dikatakan sah menurut Habermas, apabila dapat dijelaskan dan diakui secara intersubjektif melalui pemberian alasan (Erklärung) dan (Begründung). Bentuk komunikasi dengan mempersoalkan klaim-klaim kesahihan dalam pernyataan-pernyataannya disebut sebagai diskursus (Hardiman, 2009). Ide mengenai etika diskursus dibangun melalui proses komunikatif dengan tujuan untuk menyepakati nilai-nilai yang dapat dihidupi bersama. Proses komunikatif tersebut menjadi penting karena merupakan dasar bagi proses integrasi sosial.

Teori etika diskursus menawarkan sebuah prosedur praktis untuk memecahkan problem-problem norma sosial. Diskursus ini bertujuan untuk mencapai pemahaman timbal balik atas norma-norma tindakan yang dipatuhi bersama (Hardiman, 2009). Persoalan terkait argumentasi moral tidak dapat diselesaikan secara monologal, tetapi butuh upaya-upaya kooperatif melalui komunikasi yang rasional (Habermas, 2007). Konsensus dapat dikatakan rasional apabila dapat diterima secara intersubjektif. Manusia sebagai makhluk otonom sekaligus berakal budi, akan semakin teraktualisasi apabila mereka hidup dalam tantangan norma yang membuat mereka tetap otonom dan rasional. Orang-orang yang hadir dalam diskursus juga harus mengusahakan supaya konsensus juga dapat diterima oleh orang-orang yang tidak hadir.

Budi Hardiman berpendapat ide Habermas mengenai diskursus merupakan sebuah teori yang mendorong reformasi dalam demokrasi (Hardiman, 2009). Model demokrasi yang sesuai dengan etika prosedural yang diusulkan oleh Habermas adalah demokrasi deliberatif. Istilah

deliberatif berasal dari kata latin “deleberatio” yang memiliki arti “konsultasi” atau “menimbang-nimbang” atau pengertian yang dekat dengan konteks ke-Indonesia-an adalah “musyawarah”. Demokrasi deliberatif tidak memusatkan perhatian aturan-aturan dan tuntutan pada masyarakat akan tetapi berfokus pada prosedur yang menghasilkan aturan-aturan. Dalam demokrasi deliberatif yang menjadi sumber bagi legitimasi atas norma/hukum adalah formasi deliberatif, argumentasi diskursif suatu keputusan politik yang ditimbang bersama yang bersifat senantiasa dan terbuka terhadap revisi (Hardiman, 2009).

Demokrasi deliberatif diimplmentasikan dengan pengambilan keputusan hidup bersama yang diproses melalui diskursus dan diskusi publik. Negara dan masyarakat terhubung melalui proses diskursus, di mana hukum menjadi mediumnya. Keputusan tidak diambil secara sepihak, tetapi diputuskan berdasarkan hasil diskursus rasional (Muttaqien et.al, 2023). Dalam demokrasi deliberatif, rasionalitas adalah penentu terjadinya konsensus. Diskursus dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip tindakan komunikatif.

#### **e. Persoalan Krisis Demokrasi di Indonesia dalam Tinjauan Pemikiran Jürgen Habermas**

Persoalan dalam demokrasi di Indonesia berdasarkan data yang disebutkan di latar belakang masalah, adalah terkait dengan kebebasan berpendapat. Intimidasi, terror dan kekerasan yang dialami oleh jurnalis, aktivis dan masyarakat yang bersuara kritis, menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam proses demokrasi. Esensi dari demokrasi adalah pemerintahan yang memberikan tempat tertinggi pada aspirasi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat seharusnya diberi tempat yang seluas-luasnya.

Pemikiran Habermas mengenai elemen-elemen demokrasi dalam bentuk ruang publik, tindakan komunikatif, dan prinsip-prinsip deliberatif, memberikan gambaran bagaimana aspirasi tersebut harus dikelola. Dalam konteks ruang publik politik, masyarakat perlu memiliki tempat untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi publiknya secara bebas. Gambaran ruang publik yang ideal menurut Habermas adalah ruang publik harus dibebaskan dari intervensi kekuasaan dan pasar. Terjadinya teror, kekerasan, dan intimidasi adalah bentuk intervensi ruang publik yang dapat mengganggu jalannya kepublikan.

Demokrasi Habermasian berlandaskan pada tindakan komunikatif, di mana setiap pihak berhak untuk menyuarakan pendapatnya dengan prinsip-prinsip komunikatif, yang mengedepankan keterbukaan dan timbal balik komunikasi. Kekerasan, terror dan intimidasi, tentu bukan tindakan komunikatif, sebaliknya tindakan-tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang murni strategis. Dalam demokrasi yang didasari oleh tindakan komunikatif, aspirasi publik harus ditanggapi dengan komunikasi yang mengedepankan rasionalitas serta ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan prinsip kesahihan (benar, jujur, dan tepat secara moral).

Berdasarkan prinsip demokrasi deliberatif, yang akan menjadi penentu dari suatu proses politik adalah proses deliberasi yang berlangsung di dalamnya. Keputusan dan konsensus dijalankan dengan mempertimbangkan rasionalitas. Justifikasi atas suatu keputusan didasarkan pada apakah keputusan tersebut dapat diterima sebagai keputusan yang masuk akal, oleh pihak-pihak yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Keberadaan kekerasan dan intimidasi tentu kurang sesuai dengan prinsip dalam demokrasi deliberatif, karena ada pihak-pihak yang justru memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang non-deliberatif.

Demokrasi adalah sistem yang mengedepankan aspirasi masyarakat dan rasionalitas untuk bisa mengusahakan keputusan-keputusan terbaik bagi hidup bersama. Demokrasi tidak bisa tercapai hanya dengan sistem pemilihan saja, negara perlu untuk menyiapkan masyarakat yang demokratis apabila hendak mencapai demokrasi yang esensial. Elemen-elemen demokrasi seperti ruang publik politik, tindakan komunikatif dan prinsip-prinsip deliberatif sangat diperlukan dalam mengupayakan demokrasi yang ideal. Segala bentuk kekerasan, terror dan intimidasi, yang tidak sesuai dengan praktik-praktik demokrasi perlu untuk ditindak dengan tegas apabila hendak menguatkan demokrasi.

#### **4. Simpulan**

Bagi bangunan demokrasi, pemikiran Habermas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai elemen-elemen mendasar untuk mencapai demokrasi radikal. Keberadaan elemen-elemen tersebut menjadi prasyarat dalam membangun demokrasi yang ideal. Suatu negara demokrasi yang tidak memiliki elemen-elemen tersebut akan jatuh pada demokrasi yang bersifat formal, tanpa dijiwai dan diisi dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan sifat demokratis. Elemen pertama adalah ruang publik dan warga berdaya (*civil*

*society*). Ruang publik digambarkan sebagai ruang diskursus yang menampung aspirasi masyarakat sipil. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila terdapat ruang publik politik, yang dipahami sebagai tempat, sekaligus sebagai keterlibatan aktif masyarakat. Ruang publik perlu diisi oleh warga berdaya yang menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Ruang publik secara implisit juga dapat dimaknai sebagai 'ruang pikiran' dan 'ruang tindakan' di mana seorang individu tidak hanya memiliki orientasi tujuan individual tetapi juga menyadari dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan memiliki dimensi kepublikan. Melalui kepublikan itulah dirinya dibentuk dan menjadi bagian dari suatu tatanan politik, sehingga seorang individu perlu mendedikasikan ruang bagi pikiran dan tindakannya bagi publik. Elemen kedua adalah tindakan komunikatif dan keterhubungan antaran *lebenswelt*- sistem. Demokrasi adalah sistem yang dibentuk melalui tindakan komunikatif. Praksis komunikasi menjadi sentral dalam demokrasi. Bagi Habermas tindakan komunikatif yang bebas dan fair, serta dilandasi oleh klaim-klaim kesahihan adalah sesuatu yang mendasar dalam bangunan demokrasi yang ideal. Sementara itu dalam realpolitik, tindakan strategis lebih mendominasi. Apabila hendak merekonstruksi demokrasi, diperlukan dorongan untuk mengarahkan diskursus publik menjadi semakin komunikatif. Dalam demokrasi, pemerintahan, sebagai salah satu pusat sistem yang mengatur hidup bersama juga perlu untuk bersinergi dengan *lebenswelt*. Elemen ketiga adalah diskursus dan proses deliberasi. Demokrasi adalah sistem yang mengakomodasi diskursus dalam hidup bersama. Demos akan mendapatkan 'kratos'-nya melalui proses diskursus publik. Kehidupan bersama dalam masyarakat demokratis merupakan kehidupan yang dinamis yang digerekan melalui diskursus komunikatif. Pengambilan keputusan dalam demokrasi dijalankan melalui proses deliberasi dalam diskursus. Deliberasi digambarkan sebagai proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan secara maksimal, keputusan-keputusan yang dapat diterima oleh setiap orang yang dikenai hukum dan/atau kebijakan. Dalam proses deliberasi, tindakan komunikatif yang mengedepankan rasionalitas menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Suatu masyarakat demokratis hanya akan menjadi sungguh-sungguh demokratis, apabila proses deliberasi dan diskursus rasional berjalan. Apabila hendak membentuk masyarakat yang semakin demokratis, masyarakat dan negara perlu mendorong terjadinya diskursus rasional dan proses deliberasi yang didasari tindakan komunikatif. Elemen-elemen tersebut merupakan hal mendasar dalam sebuah bangunan demokrasi. Apabila elemen-elemen tersebut absen atau rusak, diperlukan upaya untuk segera merekonstruksinya. Demokrasi yang mendasar berdiri melalui elemen-elemen tersebut. Pemilihan Umum hanya bisa menjadi demokratis, juga apabila didasari oleh keberadaan elemen-elemen tersebut. Pemilihan Umum yang tidak didasarkan atas elemen-elemen di atas akan menjadi proses yang rapuh dan kehilangan struktur-struktur dasar dan semangat dasarnya. Proses demokrasi tentu saja tidak hanya terkait dengan pemilu, tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana bangunan elemen-elemen tersebut dihidupi dalam dunia kehidupan.

## 5. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2025). Koalisi Masyarakat Sipil Catat 7 Kasus Intimidasi sejak Revisi UU TNI. <https://www.tempo.co/politik/koalisi-masyarakat-sipil-catat-7-kasus-intimidasi-sejak-revisi-uu-tni-1543679>
- Al Munir, M. I. (2023). Dari Kritis ke Tindakan Komunikatif (Kritik Jürgen Habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas). *Rausyan Fikr, Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 19 (1), 157-178.
- Apud, M. (2019). "Plural Society" dan Konflik Identitas. <https://news.detik.com/kolom/d-4744879/plural-society-dan-konflik-identitas>.
- Bertens, K. (2006). *Sejarah filsafat Kontemporer: Inggris Jerman*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Bertens, K. (2016). *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ellish, P. H. (2015). 'Russell Brand voted world's fourth most influential thinker', <https://www.theguardian.com/culture/2015/mar/26/hot-prospect-russell-brand-voted-worlds-fourth-most-influential-thinker>.
- Finlayson, J. G. (2005). *Habermas: Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Fact and Norms* (asli: 1992 'Faktizität und Geltung', transl by William Rehg). New Baskerville: MIT Press.

- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action Vol 1, Reason and The Rationalization of Society* (asli: 1981, 'Theorie des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrationaliät und gesellschaftliche Rasionalisierung' transl by Thomas McCharty). Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action Vol 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (asli: 1981 'Theorie des kommunikativen Handelns Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft', transl by Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of Public Sphere* (asli: 1962, 'Strukturwandel der Öffentlichkeit', transl by Thomas Burger). Cambridge: MIT Press.
- Habermas, J. (2007). *Moral Consciousness and Communicative Action* (asli: 1983, 'Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln' transl by Christian Lenhardt). Cambridge: Polity Press.
- Hanafi, M. (2024). AJI Jakarta: Serangan Pada Jurnalis Terus Bermunculan. <https://www.dw.com/id/serangan-pada-jurnalis-terus-bermunculan/a-69646716>.
- Hardiman, B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, B. (2010). *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, B. (2017). *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jafier, F. (2025). Kondisi Demokdrasi di Seluruh Dunia. <https://www.tempo.co/data/data/kondisi-demokrasi-di-seluruh-dunia-1219578>.
- Menoh, G. A. B. (2015). *Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muamar, A. (2024). Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia. <https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>.
- Mutaqqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif, VI (1), 51-64.
- Nababan, W. M. C. (2024). Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam. [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam?status=sukses\\_login&login=1737455408376&open\\_from=header\\_button&loc=header\\_button](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam?status=sukses_login&login=1737455408376&open_from=header_button&loc=header_button).
- Ingram, D. (2010). *Habermas: Introduction and Analysis*. New York: Cornell University Press.
- Plato. (2000). *The Republic* (asli: 'Politeia', transl by Tom Griffith). Cambridge: Cambridge University Press.
- Prasetyo, A. A. (2022). Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5 (03), 213-218.
- Shahwirman, T. (2023). A Critical Inquiry into Jürgen Habermas' Hermeneutical Reflection as a Methodology of Social Science: Sebuah Catatan Kritis atas Konsep J. Habermas tentang Refleksi Hermeneutis sebagai Metode Ilmu Sosial. *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 19(2), 257-291.
- Siregar, G. M. (2021). Teori Kritis Habermas dan Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Filsafat Indonesia* 4 (2), 142-151.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme*, 1 (1), 1-20.
- Ritzer, G. (2012). *Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (asli: 'Eight Edition Sociological Theory', transl by Saut Pasaribu dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.